

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pulau Jawa adalah salah satu pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 151,6 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 56,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2020). Tingkat kemajuan pembangunan tertinggi dan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Selain itu, pulau ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, destinasi wisata yang banyak, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik yang luas dan tumbuh secara cepat, dan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap. Dilihat dari peranan sektornya, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar di sektor sekunder (sektor industri, listrik, gas, air bersih, dan konstruksi) dan sektor tersier (sektor perdagangan, pengangkutan keuangan, dan jasa-jasa) (Kemendagri, 2021).

Terdapat enam Provinsi di Pulau Jawa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Keenam provinsi tersebut tidak terlepas dari masalah ketimpangan. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik dan pembangunan yang tidak merata antar setiap Provinsi. Provinsi yang memiliki pengaruh kuat akan menciptakan pola pembangunan ekonomi di wilayahnya. Ketidakmerataan berpengaruh pada kemampuan suatu daerah untuk tumbuh sehingga mengakibatkan beberapa daerah mampu tumbuh dengan cepat sementara daerah lainnya tumbuh lambat. Perbedaan kemampuan tumbuh ini akan

menyebabkan terjadinya ketimpangan. Setiap Provinsi di Pulau Jawa berupaya menekan nilai ketimpangan serendah mungkin dengan melakukan pembangunan. Pembangunan menjadi salah satu hal yang penting dalam kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya (Dewi, 2016).

Setiap Provinsi di Pulau Jawa membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan, namun kenyataannya masih mengalami kesulitan dalam menyediakan dana yang cukup. Apabila hanya mengandalkan dana dari dalam negeri saja belum cukup untuk melaksanakan pembangunan. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain dari luar negeri. Salah satunya adalah menggalakkan penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing (Septifany, 2015).

Penanaman modal asing (PMA) diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 12 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwa modal dalam penanaman modal asing tidak berarti berasal dari luar negeri saja, melainkan dapat yang sifatnya patungan (*joint venture*), dimana ada penggabungan antara modal dari luar negeri dan modal dari dalam negeri (Fadilah, 2017).

Penanaman modal asing (PMA) atau *foreign direct investment* (FDI) merupakan kegiatan penanaman modal suatu perusahaan dari suatu negara ke

perusahaan di negara lain dalam jangka panjang (Syarifudin dan Mundiroh, 2020). Penanaman modal asing bagi suatu daerah sangat penting karena memiliki potensi memberikan manfaat berupa penyediaan dana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dapat meningkatkan produktivitas karena penanaman modal asing memperkenalkan negara penerima modal dengan proses bisnis, sistem, praktek manajemen, teknologi yang baru, dan sebagai penghubung ke pasar-pasar ekspor dan rantai pasokan internasional (Samusi dkk, 2019).

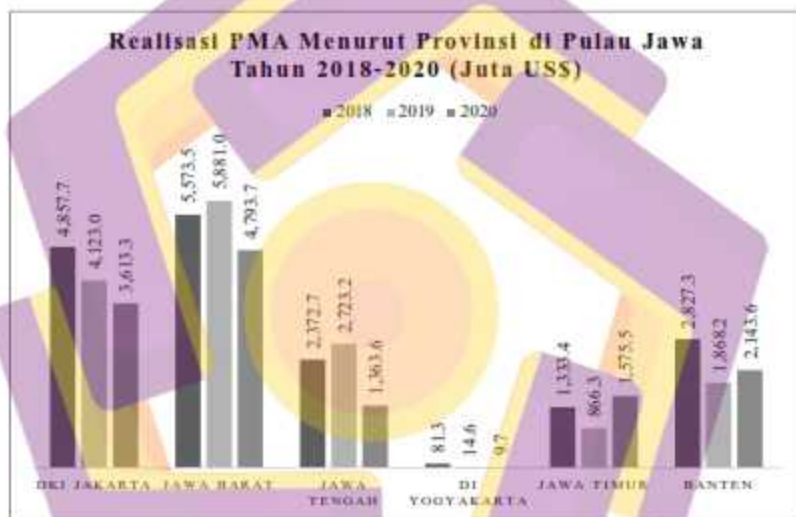


Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

**Gambar 1.1. Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia**

Berdasarkan gambar 1.1. menjelaskan bahwa tahun 2020 realisasi penanaman modal asing sebagian besar masih didominasi di kawasan Pulau Jawa yaitu sebesar 49,5 persen atau 408,8 triliun rupiah. Hal ini karena Pulau Jawa memiliki daya tarik bagi investor asing dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Realisasi

penanaman modal asing berikutnya berada di Pulau Sumatera sebesar 24,3 persen, Pulau Sulawesi sebesar 8,7 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,3 persen, Pulau Maluku dan Papua sebesar 6,2 persen, dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,0 persen. Penyerapan penanaman modal asing di luar Pulau Jawa masih sedikit karena pembangunan infrastruktur yang belum merata, terutama infrastruktur di wilayah timur Indonesia yang masih kurang (BPS, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.2. Realsasi Penanaman Modal Asing di Pulau Jawa**

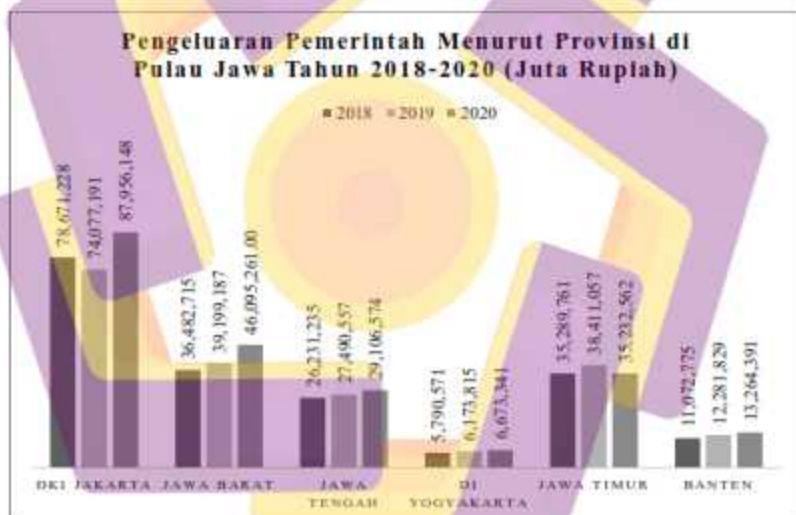
Berdasarkan gambar 1.2. menjelaskan bahwa realisasi penanaman modal asing menurut Provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan dan penurunan dengan kecenderungan menurun. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang mendominasi masuknya penanaman modal asing selama kurun waktu 2018-2020 dengan realisasi sebesar 5.573,5 juta US\$, 5.881 juta US\$, dan 4.793,7 juta US\$. Jawa Barat masih terus menjadi tujuan utama investasi asing di Pulau Jawa karena

didukung oleh iklim investasi yang lebih siap. Investor asing tertarik berinvestasi di Jawa Barat karena memiliki keunggulan di segi bidang infrastruktur yang mumpuni, produktivitas sumber daya manusia yang tinggi, dan proses perizinan investasi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 hari (DPMPTSP, 2021). Jumlah penduduk Jawa Barat terbesar di Indonesia yaitu mencapai hampir 50 juta jiwa sehingga Jawa Barat menjadi Provinsi dengan pangsa pasar besar. Hal ini akan mempermudah investor untuk memasarkan produknya di Jawa barat (Bank Indonesia, 2021).

Penanaman modal asing terendah didominasi Provinsi DI Yogyakarta dengan realisasi, yaitu tahun 2018 sebesar 81,3 juta US\$, tahun 2019 sebesar 14,6 juta US\$, dan tahun 2020 sebesar 9,7 juta US\$. Investor asing masih mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di DI Yogyakarta yang masih rendah dan skala usaha di DI Yogyakarta masih didominasi oleh usaha mikro kecil, dimana tingkat produktivitas dan outputnya lebih rendah daripada perusahaan berskala menengah atau besar. Penyebab lain penanaman modal asing DI Yogyakarta rendah yaitu dipengaruhi oleh *statistical based effect* dan pandemi Covid-19. Faktor *statistical based effect* yaitu pasca berakhirnya konstruksi Bandara YIA belum terdapat investasi besar lain yang terealisasi di DI Yogyakarta. Faktor pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa proyek strategis pemerintah tertunda, diantaranya Tol Jogja-Bawen, Tol Jogja-Solo, dan Kereta Bandara YIA (Bank Indonesia, 2021).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masuknya penanaman modal asing di Pulau Jawa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pengeluaran pemerintah, inflasi, dan upah minimum. Pengeluaran pemerintah adalah seluruh

pembayaran dan pembelian barang dan jasa untuk kepentingan pemerintahan, seperti pembayaran gaji pegawai, pembangunan jalan raya, penyediaan barang publik, dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal dan unsur permintaan agregat. Peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat kemudian akan mendorong pihak pengusaha untuk melakukan peningkatan produksi sehingga akan menciptakan iklim usaha yang baik. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan jumlah investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Siregar, 2016).



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.3. Pengeluaran Pemerintah di Pulau Jawa**

Berdasarkan gambar 1.3, bahwa pengeluaran pemerintah enam Provinsi di Pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan. DKI Jakarta adalah Provinsi dengan tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi. Pengeluaran pemerintah tahun 2018 sebesar 78.671.228 juta rupiah yang didorong oleh program unggulan yaitu

pembangunan maupun peningkatan jalan dan jembatan, dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota. Tahun 2019 sebesar 74.077.191 juta rupiah yang didorong oleh komponen penyertaan modal kepada PDAM Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PT MRT Jakarta. Tahun 2020 sebesar 87.956.148 juta rupiah yang didorong oleh pembentukan dana cadangan daerah, pembayaran pokok utang, dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Jakarta Toursindo, PT Mass Rapid Transportation (MRT), PT Jakarta Propertindo, PDAM Jaya, PD Pasar Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PD PAL Jaya (Bank Indonesia, 2021). Provinsi dengan tingkat pengeluaran pemerintah terendah adalah DI Yogyakarta. Pengeluaran pemerintah DI Yogyakarta tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 5.790.571 juta rupiah, 6.173.815 juta rupiah, dan 6.673.341 juta rupiah yang didorong oleh komponen penyertaan modal kepada BPD DIY dan penguatan modal kepada PT Tarumartani (Bank Indonesia, 2021).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penanaman modal asing yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan tingkat harga-harga secara keseluruhan (Mankiw dkk, 2014). Sasaran inflasi nasional yang ditetapkan sebesar  $3,5 \pm 1$  persen atau antara 2,5 persen sampai dengan 4,5 persen. Menurut Sukirno (2011) bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan biaya terus menerus naik yang menyebabkan penurunan kegiatan produktif. Hal ini akan berpengaruh terhadap kegiatan investasi karena akan menurunkan minat investor asing akibat biaya investasi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, inflasi harus diredam dan dijaga agar tetap terkendali.



Sumber: Badan Pusat Statistik

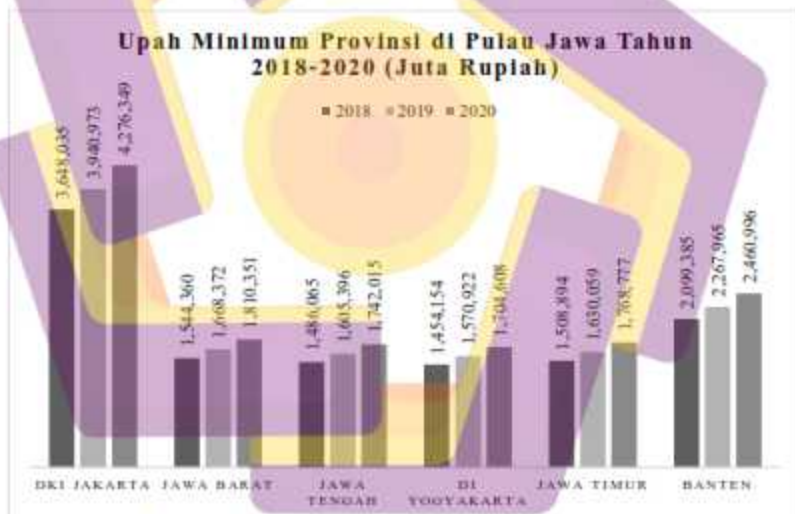
**Gambar 1.4. Inflasi di Pulau Jawa**

Tingkat inflasi enam provinsi di Pulau Jawa selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Tingkat inflasi tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 3,54 persen pada tahun 2018, sejalan dengan sasaran inflasi nasional yang ditetapkan sebesar  $3,5 \pm 1$  persen. Inflasi di Jawa Barat tersebut disebabkan oleh kinerja inflasi sebagian besar kelompok pengeluaran barang dan jasa. Tingkat inflasi terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar 1,4 persen. Rendahnya inflasi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat konsumsi karena pandemi Covid-19, namun ekspektasi inflasi masyarakat masih dalam level yang terjaga. Pada tahun 2020, seluruh Provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan inflasi dengan nilai di bawah sasaran inflasi nasional. Rendahnya inflasi ini menunjukkan tingkat konsumsi yang masih rendah karena kondisi pandemi Covid-19. Inflasi tersebut masih dalam level yang terjaga sehingga



pergerakan harga komoditas masih tetap berada pada rentang yang wajar (BPS, 2020).

Upah minimum adalah faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap penanaman modal asing. Upah minimum merupakan standar minimum yang dijadikan acuan oleh pelaku usaha untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usahanya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Upah merupakan bagian dari biaya produksi. Upah yang lebih rendah menunjukkan biaya produksi yang murah sehingga dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya (Ihsan, 2017).



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.5. Upah Minimum di Pulau Jawa**

Upah minimum setiap Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besaran upah minimum disesuaikan setiap tahun berdasarkan akumulasi tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upah minimum tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 4.276.349 juta rupiah di DKI Jakarta yang mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Upah minimum terendah sebesar 1.454.154 juta rupiah di DI Yogyakarta tahun 2018 dengan meningkat sebesar 8,71 persen dari tahun sebelumnya (BPS, 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sanusi, dkk (2019) mengenai makroekonomi dan penanaman modal asing di Indonesia: bukti empiris di Pulau Jawa dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penanaman modal asing. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal asing. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing. Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing. Penelitian tersebut hampir sejalan dengan penelitian oleh Barorah, dkk (2019) mengenai analisis investasi asing langsung (FDI) di negara ASEAN tahun 2000-2017. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap investasi asing di negara ASEAN, tingkat suku bunga dan inflasi menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap investasi asing di negara ASEAN.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap penanaman modal asing. Penelitian oleh Dewi (2016) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, BI rate, dan inflasi terhadap investasi asing langsung di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap investasi asing langsung, BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing langsung, dan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap investasi asing langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Septifany (2015) tentang analisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan cadangan devisa terhadap penanaman modal asing di Indonesia (studi pada Bank Indonesia periode tahun 2006-2014). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial suku bunga dan cadangan devisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia, serta inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian mengenai "*Analysis of The Determinants of Foreign Direct Investment in Ghana*" dengan metode analisis ECM. Hasil penelitiannya adalah secara jangka panjang dan jangka pendek bahwa inflasi, nilai tukar dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung, sedangkan PDB, produksi listrik dan penggunaan telepon berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung (Asiamah dkk, 2019). Penelitian oleh Darwin dan Hardilawati (2018) tentang analisis pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap pergerakan investasi di Pulau Riau menghasilkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap investasi Provinsi Riau, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap investasi di Provinsi Riau. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi di Provinsi Riau. Penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengeluaran